2014-2024

REKOMENDASI
UNTUK PEMERINTAH
SEPULUH TAHUN

BPI

BADAN PERFILMAN INDONESIA

www.bpi.or.id

BADAN
PERFILMAN
INDONESIA

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH
SEPULUH TAHUN BADAN PERFILMAN INDONESIA
2014-2024

Oleh : Gunawan Paggaru
Ketua Umum
Badan Perfilman Indonesia 2019-2026

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman oleh pemerintah Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa mengukur kesuksesan implementasi undang-undang ini berdasarkan tiga indikator utama: dampak ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan budaya. Jika kita fokus pada pengukuran ini maka industri film Indonesia dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional serta peran vitalnya dalam melestarikan dan memperkuat identitas budaya bangsa. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi eksternal untuk menilai keberhasilan kebijakan perfilman dalam konteks makroekonomi dan budaya.

Selain itu, tulisan ini menyoroti pentingnya legal standing Badan Perfilman Indonesia dalam mencapai tujuan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Legal standing ini memberikan kekuatan hukum dan otoritas bagi Badan Perfilman Indonesia untuk mengembangkan industri perfilman nasional, serta memastikan implementasi kebijakan yang konsisten dan efektif dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor perfilman terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan budaya.

UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman di Indonesia mengatur berbagai aspek yang terkait dengan industri film, termasuk fungsi film dari perspektif budaya dan ekonomi. Film sebagai alat strategis dalam pembangunan budaya dan ekonomi Indonesia. Dari perspektif budaya, film berfungsi sebagai media ekspresi identitas, pendidikan, dan promosi budaya lokal. Dari perspektif ekonomi, film merupakan sumber pendapatan, pencipta lapangan kerja, pendorong inovasi, dan memiliki pengaruh ekonomi multiplikatif. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, industri film dapat berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

Dalam tulisan ini ada sepuluh point penting yang menjadi perhatian Badan Perfilman Indonesia yang jika dijalankan dengan baik maka Industri perfilman Indonesia akan tumbuh dengan baik dan dapat berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional, yaitu:

A. Fungsi Budaya
B. Fungsi Ekonomi
C. Tugas dan Fungsi BPI
D. Apakah Industri Perfilman Indonesia sudah Tumbuh
E. Pengaruh Film terhadap Budaya dan Ekonomi
F. Jumlah Ideal Bioskop di Indonesia
G. Jumlah Ideal Produksi Per Tahun
H. Biaya Produksi
I. Serapan Tenaga Kerja
J. Kontribusi Industri Film Indonesia terhadap PDB

BADAN PERFILMAN INDONESIA

A. Fungsi Budaya

1. Media Ekspresi dan Identitas Budaya
   1.1. Pasal 3 dan Pasal 4
      1.1.1. Film dianggap sebagai media ekspresi budaya yang memainkan peran penting dalam mengartikulasikan dan menyebarkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan identitas nasional.
      1.1.2. Melalui film, masyarakat dapat mengeksplorasi dan memahami keragaman budaya Indonesia, memperkuat rasa kebersamaan, dan membangun identitas nasional yang kuat.

Contoh: Film seperti "Laskar Pelangi" dan "Sang Penari" mengangkat kekayaan budaya lokal dan nilai-nilai sosial, membantu memperkuat kesadaran budaya di kalangan masyarakat.

2. Pendidikan dan Pembelajaran Sosial
   2.1. Pasal 8
      2.1.1. Film juga berfungsi sebagai alat pendidikan, memberikan pengetahuan dan pembelajaran sosial kepada masyarakat.
      2.1.2. Melalui narasi dan karakter yang ditampilkan, film dapat mendidik penonton tentang sejarah, isu-isu sosial, dan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya membantu membentuk sikap dan perilaku positif.

Contoh: Film dokumenter atau drama sejarah seperti "Guru Bangsa: Tjokroaminoto" dapat mendidik masyarakat tentang tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia dan perjuangan mereka.

3. Promosi dan Perlindungan Budaya Lokal
   3.1. Pasal 12
      3.1.1. Undang-undang ini menekankan pentingnya promosi dan perlindungan budaya lokal melalui film.
      3.1.2. Produksi film yang mengangkat cerita, musik, tarian, dan adat istiadat lokal dapat membantu melestarikan budaya yang mungkin terancam punah dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional.

Contoh: Film seperti "Sebelum Iblis Menjemput" yang mengangkat elemen budaya lokal dalam genre horor modern.

B. Fungsi Ekonomi

1. Sumber Pendapatan dan Lapangan Kerja.
   1.1. Pasal 7 dan Pasal 9
      1.1.1. Industri film merupakan sumber pendapatan yang signifikan dan penciptaan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
      1.1.2. Produksi film memerlukan berbagai profesi, mulai dari aktor, sutradara, penulis naskah, hingga kru teknis dan staf pendukung lainnya, yang semuanya berkontribusi pada perekonomian.

Contoh: Produksi film besar seperti "Habibie & Ainun" yang melibatkan ratusan pekerja dari berbagai sektor.

2. Mendorong Industri Kreatif dan Inovasi.
   2.1. Pasal 6 dan Pasal 10
      2.1.1. Film mendorong perkembangan industri kreatif dan inovasi, terutama dalam bidang teknologi media, efek visual, dan animasi.
      2.1.2. Ini menciptakan peluang bagi pengembangan keahlian baru, investasi dalam teknologi, dan peningkatan daya saing industri film Indonesia di pasar global.

Contoh: Penggunaan teknologi CGI dalam film "Gundala" yang menunjukkan inovasi dalam produksi film nasional.

3. Pengaruh Ekonomi Multiplikatif.
   3.1. Pasal 13
      3.1.1. Industri film memiliki efek ekonomi multiplikatif yang luas, menciptakan dampak ekonomi positif bagi sektor-sektor lain seperti pariwisata, perhotelan, transportasi, dan makanan dan minuman.
      3.1.2. Lokasi syuting film dapat menjadi destinasi wisata baru, meningkatkan pendapatan lokal dan menarik investasi lebih lanjut.

Contoh: Lokasi syuting film "Ada Apa Dengan Cinta?" di Yogyakarta yang menjadi destinasi wisata populer.

C. Tugas dan Fungsi Badan Perfilman Indonesia.

Badan Perfilman Indonesia (BPI) memiliki tugas dan fungsi utama yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2009. Fungsi-fungsi ini dapat dikelompokkan ke dalam perspektif budaya dan ekonomi:

1. Perspektif Budaya
   1.1. Promosi dan Pelestarian Budaya.
      1.1.1. Fungsi: BPI bertugas mempromosikan dan melestarikan nilai-nilai budaya melalui film. Ini termasuk mendorong produksi film yang mengangkat cerita-cerita lokal, tradisi, dan sejarah Indonesia.
      1.1.2. Kontribusi: Dengan mendorong produksi film yang berfokus pada budaya lokal, BPI dapat memperkuat identitas nasional dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia.

   2.1. Pendidikan dan Pembinaan.
      2.1.1. Fungsi: BPI bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pelaku industri film. Ini termasuk mengadakan workshop, seminar, dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para sineas.
      2.1.2. Kontribusi: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam industri film akan menghasilkan film-film yang lebih berkualitas, yang pada

gilirannya akan lebih mudah diterima oleh penonton domestik dan internasional.

2. Perspektif Ekonomi
   2.1. Pengembangan Industri Kreatif.
      2.1.1. Fungsi: BPI berperan dalam mengembangkan industri kreatif dengan mendorong inovasi dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam industri film.
      2.1.2. Kontribusi: Dengan mendukung proyek-proyek inovatif dan kerjasama internasional, BPI dapat membantu meningkatkan daya saing industri film Indonesia di pasar global.

   2.2. Pembiayaan dan Dukungan Produksi;
      2.2.1. Fungsi: BPI dapat berperan dalam memberikan bantuan finansial dan insentif kepada produser film untuk mendorong produksi film-film berkualitas tinggi.
      2.2.2. Kontribusi: Dukungan finansial yang kuat akan memungkinkan lebih banyak film untuk diproduksi, meningkatkan output industri dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

   2.3. Pemasaran dan Distribusi.
      2.3.1. Fungsi: BPI bertugas memfasilitasi pemasaran dan distribusi film Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional.
      2.3.2. Kontribusi: Dengan akses yang lebih baik ke pasar, film-film Indonesia dapat mencapai penonton yang lebih luas dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.

Badan Perfilman Indonesia tidak dapat menjalankan tugas dan Fungsinya sejak dibentuk oleh masyarakat perfilman sesuai dengan amanat UU No 33 tahun 2009 tentang Perfilman dengan Keputusan Presiden No. 32 tahun 2014 tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia dengan berbagai masalah yang dihadapinya yaitu:

1. Kementerian terkait yang disebutkan dalam Kepres di atas tidak dijalankan.
2. Kementerian terkait yang disebutkan dalam Kepres di atas tidak menjalankan perintah UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman Indonesia.
3. Kelemahan UU No. 33 Tahun 2009 Terkait dengan Pembiayaan Badan Perfilman Indonesia.
   3.1. Masalah: UU No. 33 Tahun 2009 tidak menetapkan sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan untuk BPI. Ini menyebabkan ketergantungan pada anggaran pemerintah yang mungkin terbatas dan tidak konsisten.
   3.2. Dampak: Keterbatasan dana menghambat kemampuan BPI untuk menjalankan program-program penting sesuai dengan yang diamanahkan oleh UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman.

Rekomendasi untuk Mengoptimalkan Fungsi BPI.

1. Penetapan Sumber Pendanaan yang Berkelanjutan.

1.1. **Solusi:** UU perlu direvisi untuk menetapkan sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan bagi BPI, termasuk alokasi anggaran tetap dari APBN dan sumbangan dari sektor swasta.
1.2. **Dampak:** Alokasi anggaran tetap dari APBN akan memberikan kepastian pendanaan bagi Badan Perfilman Indonesia (BPI). Ini memungkinkan BPI untuk merencanakan dan menjalankan program-program jangka panjang tanpa terganggu oleh ketidakpastian dana.
1.3. **Keberlanjutan:** Pendanaan yang konsisten akan memastikan keberlanjutan berbagai inisiatif dan proyek yang bertujuan untuk mengembangkan industri film nasional.

2. Kerjasama dengan Sektor Swasta
2.1 BPI dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mengembangkan Perfilman Indonesia.
2.1.1. **Dampak Positif:** Sumbangan dari sektor swasta dapat menambah sumber pendanaan BPI, memungkinkan lebih banyak proyek film untuk didanai. Ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan industri film.
2.1.2. **Diversifikasi Sumber Pendanaan:** Dengan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, BPI dapat memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mendukung berbagai proyek film.

Kesimpulan
Fungsi BPI yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2009 berpotensi besar untuk mendukung pengembangan industri film Indonesia dari perspektif budaya dan ekonomi. Namun, kelemahan dalam aspek pembiayaan dan regulasi perlu segera diatasi untuk memastikan BPI dapat berfungsi secara optimal. Dengan penetapan sumber pendanaan yang berkelanjutan, peningkatan insentif, simplifikasi proses birokrasi, dan kerjasama dengan sektor swasta, BPI dapat memainkan peran kunci dalam memajukan industri film Indonesia dan meningkatkan kontribusinya terhadap budaya dan ekonomi nasional.

D. Apakah Industri Perfilman Indonesia Sudah Tumbuh?

Industri film Indonesia memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi terhadap PDB melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Untuk mencapai ini, diperlukan peningkatan produksi film yang berkualitas, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung, dan upaya berkelanjutan dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Dengan langkah-langkah ini, industri film dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan budaya Indonesia.

Kita bangga dengan capaian penonton film Indonesia yang akhir-akhir ini terus tumbuh, dengan capaian market share 61% dan jumlah penonton mencapai 55 juta di tahun 2022. Bahkan, diprediksi pada tahun 2024 akan tembus 80 juta penonton. Apakah ini suatu keberhasilan? Kami menilai bahwa ini bukan suatu keberhasilan baik dari perspektif ekonomi maupun budaya. Namun, patut kita bangga karena penonton film Indonesia terus tumbuh.

Pertumbuhan perfilman nasional Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dari perspektif ekonomi dan budaya. Dari sisi ekonomi, kendala utama meliputi rendahnya investasi, infrastruktur terbatas, distribusi yang kurang optimal, rendahnya pendapatan box office, dan persaingan dengan film asing. Dari sisi budaya, kesulitan dalam mengukur keberhasilan budaya, kurangnya representasi dan diversitas, pengaruh budaya populer asing, serta rendahnya pendidikan dan kesadaran budaya menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi ini, diperlukan dukungan yang komprehensif dari pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri film nasional yang berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap PDB serta kesejahteraan masyarakat.
Industri film memiliki dampak yang mendalam dan luas baik terhadap budaya maupun ekonomi. Secara budaya, film memperkuat identitas nasional, meningkatkan kesadaran, mempromosikan inklusi, dan menyebarkan budaya populer.

Secara ekonomi, film menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan, mendukung industri terkait, mendorong ekspor budaya, dan memacu inovasi teknologi. Dengan dukungan yang tepat, industri film dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pembangunan budaya dan ekonomi yang berkelanjutan.

Potensi Market

1. Jumlah Film yang Diproduksi dan Ditonton:
   1.1. 150 judul film diproduksi dalam setahun.
   1.2. Total penonton mencapai 60 juta dengan market share 61%.
   1.3. Dari 150 judul, hanya 20 judul yang mencapai satu juta penonton.

2. Market Share:
   2.1. Market share 61% menunjukkan bahwa film Indonesia mendominasi pasar domestik dibandingkan dengan film asing.

3. Penonton Per Film:
   3.1. Rata-rata penonton per film dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata penonton per film} = \frac{60.000.000}{150} = 400.000 \text{ penonton/film}$$

4. Distribusi Penonton:
   4.1. Dari 150 judul, 20 judul mencapai satu juta penonton.
      4.1.1. Maka, jumlah penonton dari 20 judul tersebut adalah:
      20 film X 1.000.000 penonton/film = 20.000.000 penonton
      4.1.2. Jumlah penonton untuk 130 film lainnya adalah:
      60.000.000 penonton−20.000.000 penonton = 40.000.000 penonton
      4.1.3. Rata-rata penonton untuk 130 film lainnya adalah:
      4.1.4. 40.000.000 penonton dari 130 film≈307.692 penonton/film

Analisis Keberhasilan:

1. Keberhasilan Komersial:

1.1. Pro: 20 film yang mencapai satu juta penonton menunjukkan ada film yang sangat sukses di pasar.
1.2. Kontra: 130 film lainnya memiliki rata-rata penonton sekitar 307.692, yang mungkin kurang signifikan secara komersial.

2. Market Share:
2.1. Market share 61% menunjukkan dominasi film Indonesia di pasar domestik, yang merupakan indikator keberhasilan.

3. Diversifikasi dan Kualitas:
3.1. Pro: Produksi 150 judul menunjukkan industri film yang aktif dan beragam.
3.2. Kontra: Jika sebagian besar film tidak mencapai jumlah penonton yang signifikan, ini mungkin menunjukkan bahwa banyak film tidak cukup menarik bagi penonton.

Kesimpulan:
1. Keberhasilan Real atau Semu:
1.1. Keberhasilan Real: Jika dilihat dari market share 61%, dominasi film Indonesia di pasar domestik adalah nyata. Beberapa film mencapai kesuksesan besar dengan satu juta penonton.
1.2. Keberhasilan Semu: Jika dilihat dari sisi rata-rata penonton per film, terutama 130 film yang memiliki penonton kurang dari satu juta, banyak film yang mungkin tidak mencapai kesuksesan komersial yang signifikan.

Secara keseluruhan, meskipun ada indikasi keberhasilan dengan beberapa film yang sangat sukses dan dominasi market share, masih ada tantangan besar dalam hal kualitas dan daya tarik mayoritas film yang diproduksi. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan ini memiliki elemen keberhasilan semu, di mana angka keseluruhan tampak mengesankan, tetapi distribusi kesuksesan tidak merata.

Untuk memastikan bahwa keberhasilan industri film Indonesia menjadi lebih nyata dan merata, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat melakukan berbagai langkah strategis. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

1. Dukungan Finansial dan Insentif Pajak.
1.1. Subsidi dan Hibah: Menyediakan subsidi dan hibah untuk proyek film yang inovatif dan berpotensi tinggi, terutama untuk sineas baru dan independen.
1.2. Insentif Pajak: Memberikan insentif pajak bagi produser film yang mencapai standar tertentu dalam hal kualitas dan jumlah penonton.

2. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi
2.1. Fasilitas Produksi: Meningkatkan infrastruktur produksi film seperti studio, peralatan, dan teknologi pasca-produksi.
2.2. Platform Digital: Mendukung pengembangan platform digital lokal untuk distribusi film, yang dapat memperluas jangkauan penonton.

3. Peningkatan Kualitas dan Pelatihan

3.1. Pelatihan dan Pendidikan: Mengadakan program pelatihan dan workshop bagi sineas, termasuk penulisan naskah, penyutradaraan, dan teknik produksi.
3.2. Kolaborasi Internasional: Mendorong kolaborasi dengan industri film internasional untuk transfer pengetahuan dan teknologi.

4. Pemasaran dan Promosi
   4.1. Kampanye Promosi: Melakukan kampanye promosi film Indonesia, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.
   4.2. Festival Film: Mendukung festival film lokal dan internasional untuk memberikan platform bagi film Indonesia agar dikenal lebih luas.

5. Regulasi dan Perlindungan Pasar
   5.1. Kuota Film Lokal: Menerapkan kebijakan kuota yang mengharuskan bioskop untuk menayangkan sejumlah film lokal tertentu.
   5.2. Perlindungan Hak Cipta: Memperketat regulasi dan penegakan hukum terkait hak cipta untuk melindungi karya sineas dari pembajakan.

6. Penelitian dan Data.
   6.1 Penelitian Pasar: Melakukan penelitian pasar yang mendalam untuk memahami preferensi penonton dan tren industri.
   6.2 Database Film: Membangun database yang komprehensif tentang film Indonesia, yang mencakup data penonton, pendapatan, dan performa film.

7. Kolaborasi dengan Sektor Swasta
   7.1. Kemitraan dengan Bioskop: Bekerja sama dengan jaringan bioskop untuk memastikan distribusi yang luas dan adil bagi film lokal.
   7.2. Sponsorship dan Investasi: Mendorong perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam produksi film melalui skema sponsorship dan investasi bersama.

Kesimpulan
Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di atas, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri film untuk berkembang secara merata dan berkelanjutan. Ini akan memastikan bahwa keberhasilan industri film Indonesia tidak hanya terlihat dari jumlah produksi dan market share, tetapi juga dari kualitas dan daya tarik yang konsisten di kalangan penonton.

Analisis Pertumbuhan Perfilman Nasional yang Belum Optimal

1. Perspektif Ekonomi
   1.1. Rendahnya Investasi dan Pendanaan.
      1.1.1. Masalah: Salah satu tantangan utama dalam pertumbuhan perfilman nasional adalah rendahnya investasi dan pendanaan. Banyak produser film mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana yang cukup untuk produksi film berkualitas tinggi.
      1.1.2. Dampak: Tanpa dukungan finansial yang memadai, produksi film sering kali terbatas pada anggaran rendah, yang berdampak pada kualitas akhir film dan kemampuan untuk menarik penonton.

1.2. Infrastruktur dan Fasilitas Produksi yang Terbatas
   1.2.1. Masalah: Infrastruktur dan fasilitas produksi film di Indonesia masih terbatas. Studio film, peralatan, dan teknologi yang dibutuhkan sering kali tidak memadai atau mahal untuk diakses.
   1.2.2. Dampak: Keterbatasan ini menghambat kemampuan sineas untuk menghasilkan film berkualitas tinggi dan bersaing di pasar internasional.

1.3. Distribusi dan Akses Pasar yang Terbatas.
   1.3.1. Masalah: Distribusi film nasional sering kali terbatas pada pasar domestik dengan jaringan bioskop yang tidak merata di seluruh Indonesia. Selain itu, penetrasi ke pasar internasional juga masih terbatas.
   1.3.2. Dampak: Keterbatasan distribusi ini mengurangi potensi pendapatan dan eksposur film nasional, membatasi kemampuan industri untuk tumbuh dan berkembang.

1.4. Rendahnya Pendapatan dari Box Office.
   1.4.1. Masalah: Rendahnya pendapatan dari penjualan tiket bioskop disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk preferensi penonton terhadap film asing, harga tiket yang tinggi, dan akses terbatas ke bioskop di daerah-daerah.
   1.4.2. Dampak: Pendapatan yang rendah dari box office membatasi kemampuan produser untuk reinvestasi dalam proyek-proyek film baru dan meningkatkan kualitas produksi.

1.5. Persaingan dengan Konten Asing.
   1.5.1. Masalah: Industri film nasional menghadapi persaingan ketat dari film-film asing yang sering kali memiliki anggaran lebih besar dan dukungan pemasaran yang kuat.
   1.5.2. Dampak: Film nasional sering kali kesulitan bersaing dalam menarik penonton, yang lebih memilih film asing yang dianggap lebih menarik dan berkualitas.

2. Perspektif Budaya
   2.1. Kesulitan Mengukur Keberhasilan Kultural.
      2.1.1. Masalah: Mengukur keberhasilan film dari perspektif budaya sering kali lebih sulit dibandingkan dengan metrik ekonomi seperti pendapatan box office. Keberhasilan budaya mencakup dampak sosial, persepsi publik, dan kontribusi terhadap identitas nasional, yang sulit diukur secara kuantitatif.
      2.1.2. Dampak: Tanpa metrik yang jelas, sulit untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan budaya yang efektif untuk mendukung pertumbuhan perfilman nasional.

   2.2. Kurangnya Representasi dan Diversitas.
      2.2.1. Masalah: Film nasional sering kali kurang dalam hal representasi dan diversitas, baik dalam cerita, karakter, maupun latar belakang budaya. Hal ini membatasi daya tarik film bagi berbagai kelompok masyarakat.

2.2.2. Dampak: Kurangnya diversitas dapat mengurangi relevansi film bagi penonton yang lebih luas dan menghambat perkembangan industri yang inklusif dan representatif.

2.3. Pengaruh Budaya Populer Asing
2.3.1. Masalah: Budaya populer asing, terutama dari Hollywood, memiliki pengaruh besar terhadap selera dan preferensi penonton Indonesia. Hal ini menciptakan tantangan bagi film nasional untuk bersaing dan mendapatkan tempat di hati penonton lokal.
2.3.2. Dampak: Pengaruh kuat budaya populer asing dapat mengurangi apresiasi terhadap produk budaya lokal dan membatasi perkembangan film nasional yang otentik dan unik.

2.4. Pendidikan dan Kesadaran Budaya
2.4.1. Masalah: Kurangnya pendidikan dan kesadaran budaya di kalangan masyarakat mengurangi apresiasi terhadap film nasional. Pendidikan film dan media yang terbatas di sekolah dan institusi pendidikan juga berkontribusi terhadap rendahnya pemahaman tentang pentingnya industri film.
2.4.2. Dampak: Tanpa apresiasi yang kuat terhadap film nasional, penonton cenderung lebih memilih konten asing, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan industri film lokal.

E. Pengaruh Film terhadap Budaya dan Ekonomi

Film adalah medium yang kuat dalam menyampaikan pesan budaya, nilai-nilai, dan identitas suatu bangsa:

1. Pengaruh Film terhadap Budaya
1.1. Memperkuat Identitas Nasional:
Film dapat mempromosikan dan mempertahankan bahasa, tradisi, dan nilai-nilai lokal. Melalui cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, mitos, dan sejarah, film membantu memperkuat identitas nasional dan kebanggaan akan warisan budaya.
1.2. Pendidikan dan Kesadaran:
Film memiliki kekuatan untuk mendidik masyarakat tentang isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Dengan menyajikan cerita yang menggugah dan informatif, film dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendorong diskusi tentang topik penting.
1.3. Diversitas dan Inklusi:
Film menyediakan platform untuk berbagai suara dan perspektif. Dengan menampilkan cerita dari berbagai kelompok etnis, agama, dan latar belakang, film dapat mempromosikan inklusi dan toleransi dalam masyarakat.

1.4. Penyebaran Budaya Populer:
Film berperan dalam menyebarkan budaya populer dan mempengaruhi gaya hidup, mode, dan tren musik. Ini menciptakan pengaruh budaya yang luas dan menyatukan penonton dari berbagai latar belakang melalui pengalaman bersama.

2. Pengaruh Film terhadap Ekonomi.
   Industri film memiliki dampak ekonomi yang signifikan, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi:
   2.1. Penciptaan Lapangan Kerja:
   Produksi film melibatkan berbagai profesi, termasuk aktor, sutradara, kru teknis, penulis, dan staf pendukung lainnya. Setiap film yang diproduksi menciptakan ratusan hingga ribuan pekerjaan, dari pra-produksi hingga pasca-produksi.

   2.2. Pendapatan dari Box Office:
   Pendapatan dari penjualan tiket bioskop adalah sumber utama pemasukan bagi industri film. Pendapatan ini tidak hanya bermanfaat bagi produser film tetapi juga bagi bioskop, distributor, dan pemangku kepentingan lainnya.

   2.3. Industri Pendukung:
   Industri film mendukung berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi, perhotelan, katering, dan layanan kreatif lainnya. Lokasi syuting juga dapat meningkatkan perekonomian lokal dengan menarik wisatawan dan menggerakkan sektor pariwisata.

   2.4. Ekspor Budaya dan Pendapatan Devisa:
   Film yang sukses di pasar internasional dapat menjadi alat diplomasi budaya dan menghasilkan pendapatan devisa. Ini juga membuka peluang bagi kolaborasi internasional dan distribusi global, meningkatkan profil industri film nasional di dunia.

   2.5. Inovasi dan Teknologi:
   Industri film mendorong inovasi dalam teknologi media dan hiburan. Pengembangan efek visual, animasi, dan teknik produksi canggih menciptakan peluang bagi industri teknologi dan mendorong penelitian dan pengembangan.

   Untuk menganalisis apakah produksi 150 judul film Indonesia dalam setahun adalah keberhasilan nyata atau semu dari sisi film sebagai komoditi, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek:

F. Jumlah Ideal Bioskop di Indonesia:

Untuk menentukan jumlah ideal layar bioskop di Indonesia berdasarkan populasi dan penyebarannya, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti standar internasional, distribusi populasi, dan aksesibilitas ke layar bioskop. Mari kita lakukan analisis ini:

1. Standar Internasional
   Menurut Motion Picture Association (MPA), standar internasional yang umum digunakan adalah sekitar 1 layar bioskop per 10.000 orang.

2. Populasi Indonesia
   Populasi Indonesia adalah sekitar 270 juta orang yang tersebar di 37 provinsi.

3. Perhitungan Jumlah Ideal Layar Bioskop
   Berdasarkan standar 1 layar per 10.000 orang:

$$\text{Jumlah ideal layar} = \frac{\text{Total Populasi}}{\text{Populasi per layar}}$$

$$\text{Jumlah ideal layar} = \frac{270.000.000}{10.000} = 27.000 \text{ layar}$$

4. Distribusi Berdasarkan Provinsi
   Namun, distribusi layar harus mempertimbangkan penyebaran populasi di setiap provinsi. Jika kita ingin memastikan bahwa setiap provinsi memiliki akses yang memadai ke bioskop, kita harus mempertimbangkan distribusi layar yang proporsional.

   Misalnya, jika kita menggunakan data populasi dari setiap provinsi, kita dapat mengalokasikan jumlah layar sesuai dengan populasi provinsi tersebut. Berikut adalah contoh distribusi layar bioskop berdasarkan provinsi, dengan asumsi total layar adalah 27.000:

Provinsi	Populasi (juta)	Persentase Populasi (%)	Jumlah Layar
Jawa Barat	49	18,15	4.905
Jawa Timur	40	14,81	4.002
Jawa Tengah	35	12,96	3.501
Sumatera Utara	15	5,55	1.499
Banten	12	4,44	1.200
DKI Jakarta	10	3,70	1.000
Sulawesi Selatan	9	3,33	900
Bali	4	1,48	400
Nusa Tenggara Barat	5	1,85	500
Papua	3	1,11	300
Maluku	2	0,74	200

   (Data populasi hanya contoh, angka sebenarnya harus disesuaikan dengan data resmi.)

5. Faktor-faktor Tambahan
   5.1 **Urbanisasi:** Provinsi dengan kota-kota besar mungkin memerlukan lebih banyak layar karena konsentrasi populasi yang tinggi dan permintaan yang lebih besar.
   5.2 **Infrastruktur:** Provinsi dengan infrastruktur yang lebih baik mungkin dapat mendukung lebih banyak layar bioskop.
   5.3 **Aksesibilitas:** Beberapa daerah mungkin memerlukan lebih banyak layar untuk memastikan akses yang merata, terutama di daerah terpencil.

Kesimpulan

Secara ideal, berdasarkan standar internasional 1 layar per 10.000 orang, Indonesia memerlukan sekitar 27.000 layar bioskop untuk melayani populasinya yang berjumlah 270 juta. Distribusi layar ini harus proporsional dengan populasi di setiap provinsi dan memperhitungkan faktor-faktor seperti urbanisasi, infrastruktur, dan aksesibilitas untuk memastikan bahwa seluruh populasi memiliki akses yang memadai ke layar bioskop.

G. Jumlah Ideal Produksi Per Tahun:

Untuk menentukan jumlah ideal judul film yang sebaiknya diproduksi dalam setahun, dengan mempertimbangkan market potensial sebesar 270 juta penduduk dan penyediaan 27.000 layar bioskop, kita perlu melakukan analisis yang mencakup beberapa aspek, termasuk kapasitas layar, permintaan pasar, dan rata-rata penonton per film. Berikut adalah langkah-langkah analisisnya:

1. Kapasitas Layar Bioskop
   Jika kita asumsikan bahwa setiap layar dapat menayangkan 4 film berbeda per hari (dengan asumsi durasi film sekitar 2 jam termasuk iklan dan interval), maka total jumlah tayangan per layar per tahun adalah:

   Total kapasitas tayangan per tahun=27.000 layar×1.460 tayangan/layar/tahun=39.420.000 tayangan/tahun

2. Rata-rata Penonton per Tayangan
   Selanjutnya, kita perlu memperkirakan berapa banyak penonton yang akan menonton setiap tayangan. Jika kita mengasumsikan rata-rata penonton per tayangan adalah 100 orang, maka total kapasitas penonton per tahun adalah:

   Total kapasitas penonton per tahun=39.420.000 tayangan/tahun×100 penonton/tayangan = 3.942.000.000 penonton/tahun

3. Rata-rata Penonton per Film
   Dengan populasi 270 juta dan asumsi bahwa setiap orang menonton rata-rata 2 film per tahun, total penonton potensial per tahun adalah:

   Total penonton potensial per tahun = 270.000.000 orang × 2 film/orang/tahun = 540.000.000 penonton/tahun

4. Jumlah Ideal Judul Film
   Untuk menghitung jumlah ideal judul film yang sebaiknya diproduksi, kita perlu membagi total penonton potensial dengan rata-rata penonton per film. Jika kita mengasumsikan bahwa setiap film memiliki rata-rata 500.000 penonton (untuk menyeimbangkan antara film yang sangat populer dan yang kurang populer), maka:

$$\text{Jumlah ideal judul film} = \frac{\text{Total penonton potensial per tahun}}{\text{Rata-rata penonton per tahun}}$$

$$\text{Jumlah ideal layar} = \frac{540.000.000}{500.000} = 1.080 \text{ judul film/tahun}$$

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dengan market potensial 270 juta penduduk dan penyediaan 27.000 layar bioskop, jumlah ideal judul film yang sebaiknya diproduksi dalam setahun adalah sekitar 1.080 judul. Jumlah ini memperhitungkan kapasitas layar bioskop, rata-rata penonton per tayangan, dan total penonton potensial per tahun. Hal ini juga mempertimbangkan variasi dalam popularitas film untuk mencapai distribusi penonton yang merata.

Jumlah ideal judul film yang sebaiknya diproduksi per tahun dengan asumsi rata-rata capaian penonton 1.000.000 dari 50% film yang diproduksi, kita perlu menganalisis beberapa faktor, termasuk populasi, kapasitas layar bioskop, dan target penonton. Berikut langkah-langkah analisisnya:

1. Populasi dan Kapasitas Bioskop
   1.2. Populasi Indonesia: 270 juta orang
   1.3. Jumlah Layar Bioskop: 27.000 layar

2. Total Penonton Potensial
   Misalkan setiap orang menonton rata-rata 2 film per tahun:

   Total penonton potensial per tahun=270.000.000 orang×2=540.000.000 penonton/tah un

3. Capaian Penonton untuk 50% Film
   Jika 50% dari film yang diproduksi mencapai rata-rata 1.000.000 penonton per film, kita perlu menghitung jumlah film tersebut terlebih dahulu.
   Misalkan æ adalah jumlah film yang diproduksi per tahun. Maka, 50% dari æ (atau 0.5 æ) akan mencapai 1.000.000 penonton per film.
4. Hitung Jumlah Penonton dari 50% Film
   Jumlah penonton dari 50% film yang mencapai 1.000.000 penonton per film:
   Penonton dari 50% film = 0.5 æ X 1.000.000
5. Jumlah Penonton dari Sisa 50% Film
   Asumsikan sisa 50% film yang diproduksi menarik rata-rata (y) penonton per film. Maka, total penonton dari sisa 50% film adalah:

   Penonton dari sisa 50% film = 0.5 æ X (y))

6. Total Penonton Per Tahun

   Total penonton per tahun = (0.5 æ X 1.000.000) + (0.5 æ X (y))

7. Penyesuaian dengan Total Penonton Potensial

Total penonton per tahun harus mendekati total penonton potensial, yaitu 540.000.000 penonton. Sehingga:

0.5æ x 1.000.000 + 0.5 æ x (y) = 540.000.000

Kita perlu membuat asumsi nilai rata-rata (y) untuk sisa 50% film. Misalnya, kita asumsikan y adalah 100.000 penonton per film (ini adalah asumsi dan bisa disesuaikan berdasarkan data historis atau estimasi industri).

$$0.5æ \text{ X } 1.000.000 + 0.5 \text{ æ X } 100.000 = 540.000.000$$
$$0.5æ\ (1.000.000 + 100.000) = 540.000.000$$
$$0.5 \text{ æ X } 1.100.000 = 540.000.000$$
$$\text{æ X } 1.100.000 = 1.080.000.000$$
$$\text{æ} = \frac{1.080.000.000}{1.100.000} = 981{,}82$$

Kesimpulan
Jumlah ideal judul film yang sebaiknya diproduksi per tahun adalah sekitar 982 judul. Dalam skenario ini, 50% dari film yang diproduksi diharapkan dapat mencapai rata-rata 1.000.000 penonton per film, sementara sisa 50% film menarik rata-rata 100.000 penonton per film. Ini memberikan total penonton tahunan yang mendekati potensi pasar penonton sebesar 540 juta penonton per tahun.

H. Biaya Produksi

Untuk menentukan analisis biaya produksi yang layak jika target penonton adalah 1.000.000 dengan harga tiket Rp 45.000, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek:

1. Total Pendapatan dari Tiket
2. Biaya Distribusi dan Pemasaran
3. Biaya Operasional Bioskop
4. Pembagian Pendapatan dengan Bioskop
5. Keuntungan yang Diharapkan
6. Biaya Produksi

1. Total Pendapatan dari Tiket
   Jika target penonton adalah 1.000.000 dan harga tiket Rp 45.000, total pendapatan dari penjualan tiket adalah:

   Total Pendapatan = 1.000.000 X times Rp 45.000 = Rp 45.000.000.000

2. Biaya Distribusi dan Pemasaran
   Biaya distribusi dan pemasaran biasanya berkisar antara 20-30% dari total pendapatan. Asumsikan kita mengambil 25% untuk distribusi dan pemasaran:

   Biaya Distribusi dan Pemasaran = 0.25 X times Rp 45.000.000.000 = Rp 11.250.000.000

3. Biaya Operasional Bioskop

Biaya operasional bioskop termasuk biaya pemutaran, staf, dan lainnya. Biasanya, bioskop mengambil sekitar 50% dari pendapatan tiket sebagai biaya operasional dan bagi hasil:

Biaya Operasional Bioskop = 0.50 X times Rp 45.000.000.000 = Rp 22.500.000.000

4. Pembagian Pendapatan dengan Bioskop
   Pendapatan bersih setelah pembagian dengan bioskop dan biaya distribusi adalah:

   Pendapatan Bersih = Rp 45.000.000.000 - (Rp 22.500.000.000 + Rp 11.250.000.000) = Rp 11.250.000.000

5. Keuntungan yang Diharapkan
   Produsen film biasanya mengharapkan keuntungan sekitar 20-30%. Asumsikan kita mengambil 25% sebagai keuntungan yang diharapkan:

   Keuntungan yang Diharapkan = 0.25 X Rp 11.250.000.000 = Rp 2.812.500.000

6. Biaya Produksi yang Layak
   Biaya produksi yang layak adalah pendapatan bersih dikurangi keuntungan yang diharapkan:

   Biaya Produksi yang Layak = Rp 11.250.000.000 - Rp 2.812.500.000 = Rp 8.437.500.000

Kesimpulan
Biaya produksi yang layak untuk sebuah film dengan target penonton 1.000.000 dan harga tiket Rp 45.000 adalah sekitar Rp 8.437.500.000. Ini mempertimbangkan biaya distribusi dan pemasaran, biaya operasional bioskop, dan keuntungan yang diharapkan oleh produsen film.

I. Serapan Tenaga Kerja
Untuk menganalisis serapan tenaga kerja dalam industri film Indonesia, kita perlu mempertimbangkan jumlah film yang diproduksi, jumlah orang yang bekerja per film, dan efisiensi penggunaan tim produksi. Berikut adalah langkah-langkah analisisnya:

1. Jumlah Judul Film dan Tenaga Kerja per Film
   1.1. Jumlah Judul Film: 982 judul per tahun
   1.2. Tenaga Kerja per Film: 150 orang per film

2. Efisiensi Penggunaan Tim Produksi
   2.1. Target: 2 judul dalam satu tim produksi
   2.2. Tenaga Kerja per Tim Produksi: 150 orang

3. Hitung Jumlah Tim Produksi yang Dibutuhkan

   Jika setiap tim produksi dapat menangani 2 judul film per tahun, jumlah tim produksi yang dibutuhkan adalah:

$$\text{Jumlah Tim Produksi} = \frac{\text{Jumlah Judul Film}}{\text{Judul per Tim Produksi}} = \frac{982}{2} = 491 \text{ tim produksi}$$

4. Hitung Total Tenaga Kerja yang Diserap
   Setiap tim produksi terdiri dari 150 orang. Maka total tenaga kerja yang diserap dalam setahun adalah:

   Total Tenaga Kerja = Jumlah Tim Produksi X Tenaga Kerja per Tim = 491 X 150 = 73.650 orang

Kesimpulan
Dengan asumsi bahwa setiap tim produksi dapat menangani 2 judul film dalam setahun dan setiap tim terdiri dari 150 orang, total serapan tenaga kerja dalam industri film Indonesia untuk 982 judul film adalah sekitar 73.650 orang per tahun. Ini mencerminkan jumlah orang yang secara langsung terlibat dalam produksi film, termasuk berbagai peran seperti aktor, sutradara, kru teknis, penulis, dan staf pendukung lainnya.

Untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh institusi pendidikan film untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai, kita perlu menghitung total jumlah lulusan per tahun dari perguruan tinggi dan SMK, kemudian membandingkannya dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

1. Jumlah Tenaga Kerja yang Diperlukan
   1.1. Jumlah total tenaga kerja yang dibutuhkan: 73.650 orang
   1.2. Jumlah tenaga kerja yang tersedia saat ini: 20.000 orang
   1.3. Kekurangan tenaga kerja: 73.650 - 20.000 = 53.650 orang

2. Lulusan per Tahun dari Perguruan Tinggi dan SMK
   2.1. Jumlah perguruan tinggi: 21 Lulusan per perguruan tinggi per tahun: 50 mahasiswa.
   Total lulusan dari perguruan tinggi per tahun: 21 X 50 = 1.050 lulusan

   2.2. Lulusan per Tahun dari SMK: 21 Lulusan per SMK per tahun: 30 siswa
   Total lulusan dari SMK per tahun: 21 X 30 = 630 lulusan

   2.3. Total Lulusan per Tahun
   Total lulusan per tahun = 1.050 + 630 = 1.680 lulusan

3. Waktu yang Dibutuhkan untuk Memenuhi Kekurangan Tenaga Kerja
   Untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menambah tenaga kerja yang tersedia hingga mencapai jumlah yang diperlukan:

$$\text{Waktu yang dibutuhkan} = \frac{\text{Kekurangan tenaga kerja}}{\text{Total lulusan per tahun}}$$

$$\text{Waktu yang dibutuhkan} = \frac{53.650}{1.680} = 31{,}93 \text{ tahun}$$

Kesimpulan
Institusi pendidikan film (perguruan tinggi dan SMK) akan membutuhkan sekitar 32 tahun untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan industri film sebesar 73.650 orang, dengan asumsi saat ini ada 21 perguruan tinggi dan 21 SMK yang masing-masing menghasilkan 50 dan 30 lulusan per tahun.

Pertimbangan Tambahan
1. Peningkatan Kapasitas Pendidikan: Pemerintah dan institusi pendidikan dapat meningkatkan kapasitas penerimaan mahasiswa untuk mempercepat proses ini.
2. Pelatihan Singkat: Selain pendidikan formal, program pelatihan dan sertifikasi singkat dapat diselenggarakan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja siap pakai.
3. Retensi dan Akomodasi: Strategi untuk mempertahankan lulusan dalam industri film dan mengakomodasi mereka yang mungkin berpindah karir.

J. Kontribusi Industri Film Indonesia terhadap PDB

1. Jumlah Ideal Judul Film yang Diproduksi per Tahun
   1.1. Analisis: Dengan populasi 270 juta dan 27.000 layar bioskop, jumlah ideal judul film yang sebaiknya diproduksi per tahun adalah sekitar 982 judul.
   1.2. Penjelasan: Ini mempertimbangkan target rata-rata penonton 1.000.000 untuk 50% film yang diproduksi, dengan asumsi bahwa setiap film lain akan menarik rata-rata 100.000 penonton.

2. Biaya Produksi yang Layak
   2.1. Analisis: Jika target penonton adalah 1.000.000 dengan harga tiket Rp 45.000, total pendapatan per film adalah Rp 45.000.000.000. Setelah dikurangi biaya distribusi, pemasaran, operasional bioskop, dan keuntungan yang diharapkan, biaya produksi yang layak untuk sebuah film adalah sekitar Rp 8.437.500.000.
   2.2. Penjelasan: Ini memastikan film dapat mencapai target penonton dan memberikan keuntungan yang memadai bagi produser.

3. Serapan Tenaga Kerja
   3.1 Analisis: Dengan 982 judul film per tahun dan setiap judul mempekerjakan sekitar 150 orang, total serapan tenaga kerja adalah 73.650 orang per tahun, dengan asumsi satu tim produksi dapat menangani 2 judul film per tahun.
   3.2 Penjelasan: Ini mencerminkan potensi besar industri film dalam menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor terkait.

4. Pendidikan dan Penyediaan Tenaga Kerja
   4.1. Analisis: Saat ini ada 20.000 tenaga kerja yang tersedia dalam industri film. Dengan 21 perguruan tinggi dan 21 SMK yang masing-masing menghasilkan 50 dan 30 lulusan per tahun, total lulusan per tahun adalah 1.680 orang.
   4.2. Penjelasan: Diperlukan sekitar 32 tahun untuk menambah tenaga kerja yang tersedia hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan (73.650 orang), kecuali ada peningkatan kapasitas pendidikan dan program pelatihan tambahan.

5. Kontribusi terhadap PDB
   5.1. Analisis: Industri film memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap PDB melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengembangan sektor terkait.
   5.2. Penjelasan: Dengan rata-rata biaya produksi sekitar Rp 8,44 miliar per film dan 982 film per tahun, total investasi dalam produksi film mencapai sekitar Rp 8,29 triliun per tahun. Ini belum termasuk pendapatan tambahan dari distribusi, pemasaran, dan kegiatan ekonomi terkait.

6. Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah
   6.1. Dukungan Finansial: Subsidi, hibah, dan insentif pajak untuk mendukung produksi film berkualitas tinggi.
   6.2. Pengembangan Infrastruktur: Peningkatan fasilitas produksi dan platform digital untuk distribusi.
   6.3. Pelatihan dan Pendidikan: Program pelatihan, workshop, dan kolaborasi internasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
   6.4. Pemasaran dan Promosi: Kampanye promosi dan dukungan untuk festival film lokal dan internasional.
   6.5. Regulasi dan Perlindungan Pasar: Kuota film lokal dan perlindungan hak cipta untuk mendukung industri film.
   6.6. Rancangan Induk Perfilman Indonesia: Penting untuk memberikan arah strategis dalam pengembangan industri film nasional. Dengan memperkuat infrastruktur, mengembangkan sumber daya manusia, mempromosikan budaya, menguatkan regulasi, dan mendorong inovasi, industri film Indonesia dapat tumbuh lebih pesat dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi dan budaya nasional.
   6.7. Badan Perfilman Indonesia: Kelemahan dalam pembiayaan dan regulasi BPI perlu segera diatasi untuk memastikan implementasi yang efektif sesuai dengan amanahkan UU no. 33 tahun 2009 tentang perfilman.

Kesimpulan
Industri film Indonesia memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi terhadap PDB melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Untuk mencapai ini, diperlukan peningkatan produksi film yang berkualitas, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung, dan upaya berkelanjutan dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Dengan langkah-langkah ini, industri film dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan budaya Indonesia.

Rekomendasi:
1. **Peningkatan Evaluasi Ekonomi dan Sosial:** Pemerintah disarankan untuk memperluas dan memperdalam evaluasi dampak ekonomi dan sosial dari sektor perfilman, dengan mempertimbangkan lebih banyak indikator yang dapat menggambarkan kontribusi sektor ini secara lebih menyeluruh.
2. **Penguatan Legal Standing Badan Perfilman Indonesia:** Perlu ada usaha yang lebih besar untuk memperkuat legal standing Badan Perfilman Indonesia, memastikan bahwa badan ini memiliki semua kekuatan hukum dan otoritas yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

3. **Fokus pada Penyerapan Tenaga Kerja:** Pemerintah dan pihak terkait harus lebih fokus pada upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di industri perfilman, melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan serta penciptaan lebih banyak peluang kerja.
4. **Pengembangan Pendidikan Film:** Pemerintah dan lembaga pendidikan disarankan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan film yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan industri perfilman saat ini. Ini termasuk penyediaan pelatihan teknis dan kreatif, serta penekanan pada pemahaman tentang aspek hukum dan bisnis perfilman, untuk mempersiapkan generasi profesional film yang kompeten dan siap menghadapi tantangan industri.
5. **Pelestarian dan Penguatan Budaya:** Perlu ada strategi yang lebih terencana untuk memanfaatkan industri perfilman sebagai alat pelestarian dan penguatan identitas budaya bangsa, dengan mendukung produksi film yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia.
6. **Peningkatan Koordinasi dan Implementasi Kebijakan:** Memperbaiki koordinasi antar lembaga pemerintah dan pihak terkait dalam implementasi kebijakan perfilman untuk memastikan bahwa semua kebijakan dijalankan secara konsisten dan efektif.

Kesimpulan Rekomendasi:
Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa pemerintah harus benar-benar serius menjalankan amanah Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dengan fokus pada tiga indikator utama untuk mengukur kesuksesan implementasi undang-undang, yaitu:

1. **Dampak ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)**
2. **Tingkat penyerapan tenaga kerja**
3. **Ketahanan budaya**

Indikator-indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi eksternal untuk menilai keberhasilan kebijakan perfilman dalam konteks makroekonomi dan budaya. Oleh karenanya, perlu segera membuat Rancangan Induk Perfilman Indonesia untuk memberikan arah strategis dalam pengembangan industri film nasional. Dengan memperkuat infrastruktur, mengembangkan sumber daya manusia, mempromosikan budaya, menguatkan regulasi, dan mendorong inovasi, industri film Indonesia dapat tumbuh lebih pesat dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi dan budaya nasional.

Jakarta, 21 Juli 2024

BADAN
PERFILMAN
INDONESIA

Daftar Pustaka:

1. undang undang no. 33 tahun 2009 tentang perfilman : https://www.bpi.or.id/doc/73283uu_33_tahun_2009.pdf
2. keputusan presiden no. 32 tahun 2014 tentang pengukuhan badan perfilman indonesia : https://www.bpi.or.id/doc/76739keputusan%20presiden%20no%2032%20tahun%202014%20tentang%20pengukuhan%20badan%20perfilman%20indonesia.pdf
3. hasil harmonisasi perundang undangan dan peraturan terkait perfilman indonesia: https://www.bpi.or.id/doc/68260laporan%20akhir%20pokja%20perfilman%20(final).pdf
4. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 30 tahun 2019 tentang pengutamaan film indonesia dan pengutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri : https://www.bpi.or.id/doc/77797salinan%20%20permendikbud%20no.%2030%20tahun%202019.pdf
5. keputusan presiden republik indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang hari film nasional : https://www.bpi.or.id/doc/43290keppres_no_25_th_1999.pdf
6. dampak ekonomi industri layar di indonesia sebuah peluang : https://www.bpi.or.id/doc/76770dampak%20ekonomi%20industri%20layar%20di%20indonesia%20sebuah%20peluang.pdf
7. wajah perfilman indonesia: https://www.bpi.or.id/artikel-27-wajah_perfilman_nasional_di_hari_film_nasional.html
8. wajah perfilman indonesia: https://www.antaranews.com/berita/3464979/pemerintah-dukung-buku-wajah-perfilman-indonesia-jadi-naskah-akademik
9. wajah perfilman indonesia: https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/30/catatan-perfilman-indonesia-akan-dikembangkan-jadi-naskah-akademik
10. wajah pendidikan perfilman indonesia: https://www.detik.com/jabar/berita/d-6603457/wajah-pendidikan-perfilman-nasional-saat-ini
11. siapa menonton film di bioskop : https://www.bpi.or.id/doc/71175Siapa%20Menonton%20Film%20di%20Bioskop.pdf
12. Buku Wajah Perfilman Indonesia: https://drive.google.com/file/d/1aiq9MXil2CgblEnrQ2zP94QQ8t11plmQ/view?usp=sharing